

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Dharma, S. (2003). *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar.
- Erinna, V. (2020). *Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Erlina, & Rasdianto. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Fauzi. (2025). *Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2021a). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Juliyanti. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan*.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Nordiawan, D. (2017a). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Putri. (2025). *Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Ridhawati, R. (2024). *Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah*.
- Rusmana, Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017a). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Rusmana, Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017b). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Sanjaya, W. (2005). *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Kencana.
- Sedarmayanti. (2017a). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi*. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2017b). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi*. Refika Aditama.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. (2015). *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sutrisno, E. (2016a). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Suwanda, D. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintahan Daerah (2014).
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.

Yadiati, W. (2017). *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Kencana.

Zwell, M. (2007). *Creating a Culture of Competence*. John Wiley & Sons.

Sumber dari Jurnal :

Adhitama. (2017). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD*.

Ahmad, J., Nonci, N., Nurmandi, A., & Priyo Purnomo, E. (2020). What Factors Affect Financial Transparency Reports? A Study of Regional Government Financial Reports in South Sulawesi Province, Indonesia. In *International Journal of Economics and Business Administration: VIII* (Number 4).

Amalia, M., Akuntasi, J., & Negeri Bandung, P. (2023). The Effect of Regional Financial Management and Human Resource Competence on the Quality of Regional Financial Reports on SKPD of Bandung Barat Regency Sulistia Suwondo. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 79–89.

Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 26.

Annisa. (2025). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya terhadap Kualitas LKPD*.

Antonia Jultri. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan new public management terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (*Studi Pada BKAD Kabupaten Malang*). 9.

Asyafiah, P., & Simanjuntak. (2023). Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas LKPD.

Asyafiah, P., Simanjuntak, B. H., Sosial Provinsi DKI Jakarta, D., & Trisakti, U. (2023). The moderating role of the government internal control system on factors influencing the quality of local government financial reports. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 6, Number 1).

Bovens, M.A.P. (2010), "Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism", *West European Politics*, Vol. 33, No. 5, hlm. 946–967.

Christina, O. :, & Si, M. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*.

- Damri SM, & Frilla Degustina. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru).
- Dewi Andiri, & Yusrawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. 26.
- Erinna, V. (2020). *Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Fauzi. (2025). *Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Inata. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Inata, L. C., Saraswati, E., & Ghofar, A. (2022). Financial Statements Disclosure On Indonesian Local Government : IPSAS And PSAP Disclosure Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 611–625. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.20938>
- Juliyanti. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan*.
- Maharani Putri, C., Triyuwono, I., & Virginia Nur Rahmanti. (2025). Financial Statement Quality in the Public Sector: Internal Control over Reporting as a Moderating Factor. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 15(3). <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i3.40578>
- Minarni, E., Fauzi, & Hartono. (n.d.). *Implementation of Government Accounting Standards in Improving the Quality of Public Financial Reports*. Retrieved <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- Nuswantoro, M. A., & Rahmawati, E. (2025a). Exploring financial reporting quality: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 26(3), 987–1009. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i3.27667>
- Putri. (2025). *Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Pieter, J., Rumangun, E., Borolla, L., & Welerubun, T. (2021). Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Desember 2021 Journal of Public and Business Accounting*, 2(2), 36–46. <http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba>

- Rahmadina, R., Putri, I., Tripermata, L., & Putri, A. U. (2023). Factors Affecting The Quality of Financial Reports in Local Governments (Study at the Gandus District Office, Palembang City South Sumatera Province). In *International Journal of Community Service & Engagement* (Vol. 4, Number 2).
- Ridhawati, R. (2024). *Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah*.
- Sari, S. P., & Novitasari, W. (2022). Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19333>
- Syamsudin, S., & Rusli, A. (2025). The influence of government accounting standards implementation and human resource competence on the quality of financial reports.
- Zeyn, E. (2011). *Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*.

Internet/Website :

- Bedol Desa' ASN Purwakarta ke Pemprov Jabar di Masa Demul, Ada Apa? (2025, September 11). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250911075902-32-1272399/bedol-desa-asn-purwakarta-ke-pemprov-jabar-di-masa-demul-ada-apa>
- BKN: Banyak PNS Lulusan S1 & S2 Tapi Kompetensinya Rendah . (2022, July 22). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722180223-4-357861/bkn-banyak-pns-lulusan-s1-s2-tapi-kompetensinya-rendah>
- BPK beri opini WTP dengan catatan terkait BPR pada Pemprov Jabar. (2024, May 21). Antara Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/4115583/bpk-beri-opini-wtp-dengan-catatan-terkait-bpr-pada-pemprov-jabar/>
- Bubun Munawar. (2025, May 24). Kota Cimahi Raih WTP ke- 13 dari BPK RI. <https://limawaktu.id/news/kota-cimahi-raih-wtp-ke-13-dari-bpk-ri>
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 BPK RI. (n.d.). Retrieved March 3, 2026, from <https://www.bpk.go.id/ihips/>
- L.I. (2020, July 13). Ragam Opini BPK. BPK RI. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Menteri Keuangan Dorong Pemerataan Fiskal Daerah, Minta Pemda Perbaiki Kualitas Belanja. (2025, November 3). TVRI News.

<https://nasional.tvrinews.com/berita/trua4sd-menteri-keuangan-dorong-pemerataan-fiskal-daerah-minta-pemda-perbaiki-kualitas-belanja>

Penempatan PNS Harus Sesuai Tupoksi. (2015, December 14). <https://cimahikota.go.id/berita/detail/78977-penempatan-pns-harus-sesuai-tupoksi>

Tiga Tahun Berturut-turut Temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kota Cimahi. (2023, January 17). <https://www.gempurnews.com/2023/01/17/tiga-tahun-berturut-turut-temuan-bpk-ri-di-sekretariat-dprd-kota-cimahi/>

Tsabita Naja, T. R. (2025, September 19). DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/13245091/dpr-ri-terima-hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-2025-puan-bisa-jadi-bahan?page=all#page2>

Sumber dari Undang-Undang :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.